
**DEWAN DJAMBI SEMENTARA:
MENEGOSIASIKAN ULANG KESULTANAN JAMBI
MASA REVOLUSI INDONESIA 1945-1949**

**DEWAN DJAMBI SEMENTARA:
RENEGOTIATING THE JAMBI SULTANATE DURING
THE INDONESIAN REVOLUTION 1945-1949**

M. Taofik Kurohman, Yuda B. Tangkilisan, dan Abdurakhman

Departemen Sejarah, Universitas Indonesia

Depok, Jawa Barat, Indonesia

mtk17072000@gmail.com, yuda.tangkilisan@ui.ac.id, dan abimaman@gmail.com

Diterima tanggal 28 Juni 2023

Disetujui tanggal 2 November 2023

ABSTRACT

The independence revolution in Jambi was distinct from the spirit of social revolution in other regions. A sense of disappointment among Jambi's traditional elites towards the new Republican elites from outside Jambi caused local political conflict in Jambi. Accordingly, the narrative of the restoration of the Jambi Sultanate, which had been destroyed during the Jambi War of 1900-1907, emerged. Political efforts were made between the Jambi Government and the Government of the Republic of Indonesia or the Netherlands to solve political problems in Jambi. Using historical methods that focus on the process and time, the study shows that the Dewan Djambi Sementara was a council to make Jambi a particular region in the federal system, which the Dutch established at that time. The primary demand of the Dewan Djambi Sementara was to make Jambi an autonomous region by restoring the Jambi Sultanate and separating it from the Central Sumatra Province formed by the Government of the Republic of Indonesia. However, the demands of the Dewan Djambi Sementara were not accomplished because the Dutch hesitantly supported forming a region with a feudal system. In addition, political developments between the Republic of Indonesia and the Dutch, described in the Roem-Royen agreement, hindered the process. The demands for the sultanate restoration and the granting of autonomous rights vanished along with the administrative transfer from the Netherlands to the Republic of Indonesia due to the Round Table Conference in The Hague. Despite this setback, the spirit of Jambi regionalism that demanded regional autonomy was continued in youth and regional organizations during the Republic of Indonesia era. The endeavors of these organizations eventually made an autonomous region at the provincial level in 1957.

Keywords: Dewan Djambi Sementara, revolution, independence, and Jambi.

ABSTRAK

Revolusi kemerdekaan di Jambi berbeda dengan semangat revolusi sosial di daerah-daerah lain. Konflik politik lokal di Jambi didasarkan kepada rasa kecewa yang muncul di kalangan elite tradisional Jambi kepada para elite baru Republikan yang berasal dari luar Jambi. Dari hal itu, muncul narasi mengenai pemulihan Kesultanan Jambi yang telah hancur sebelumnya pada rangkaian Perang Jambi 1900-1907. Upaya-upaya politis antara Pemerintah Jambi dengan Pemerintah Republik Indonesia ataupun Belanda dilakukan untuk memecahkan permasalahan politik di Jambi. Dengan menggunakan metode historis yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Djambi Sementara adalah sebuah badan yang dibentuk untuk menjadikan Jambi sebagai daerah istimewa dalam sistem federal yang sedang dibentuk oleh Belanda. Tuntutan utama dari Dewan Djambi Sementara adalah menjadikan Jambi sebagai daerah otonom dengan cara memulihkan Kesultanan Jambi dan berpisah dari Provinsi Sumatra Tengah yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, tuntutan Dewan Djambi Sementara tidak tercapai karena terhalang oleh sikap Belanda yang ragu memberi dukungan terhadap pembentukan sebuah daerah dengan sistem feodal dan juga terhalang oleh perkembangan politik antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang dituangkan melalui Perjanjian Roem-Royen. Tuntutan akan pemulihan kesultanan dan pemberian hak otonom itu menguap bersamaan dengan peralihan administrasi antara Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun, semangat regionalisme Jambi yang menuntut otonomi daerah itu tetap dilanjutkan pada masa Republik Indonesia melalui organisasi-organisasi pemuda dan kedaerahan hingga akhirnya berhasil mendapatkan status sebagai daerah otonom setingkat provinsi pada 1957.

Kata kunci: Dewan Djambi Sementara, revolusi, kemerdekaan, dan Jambi.

A. PENDAHULUAN

Respons Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak dilakukan dengan pengakuan terhadap Republik Indonesia, melainkan berupaya untuk membentuk federasi Indonesia yang sesuai dengan kehendak ‘dekolonisasi’ Belanda (Hoek 2023:216). Hal itu kemudian menandai sebuah babak baru dalam periode pembentukan bangsa Indonesia, yaitu revolusi kemerdekaan Indonesia. Dalam bingkai revolusi kemerdekaan Indonesia, dikenal istilah revolusi sosial, yaitu suatu upaya penggulingan pemimpin tradisional yang feodal dan dianggap bekerja sama

dengan pemerintah kolonial. Revolusi sosial di beberapa daerah sering kali terjadi dengan pertumpahan darah, baik di kota maupun pedalaman. Di banyak daerah muncul tuntutan agar semua kaki tangan bekas Belanda atau Jepang dibersihkan. Revolusi kemerdekaan yang terjadi di daerah memiliki corak-corak tersendiri yang menjadi ciri khas nilai lokalitas masyarakatnya.

Emosi yang dominan pada awal kemerdekaan tidak perlu disangsikan lagi karena didasari keinginan akan terwujudnya kemerdekaan nasional, “merdeka atau mati” menjadi slogan bagi para kelompok revolusioner (Reid 2018:103). Terkadang, kekerasan yang

dilakukan oleh para pemuda revolusioner di masa revolusi sosial tidak hanya menasar para pejabat atau pemimpin tradisional yang sebelumnya berafiliasi dengan Belanda atau Jepang, namun juga orang Cina dan Indonesia (Kahin 1989:17). Di wilayah Sumatra yang lain, yaitu Jambi, revolusi sosial yang berdarah-darah tidak terjadi, namun gaung dan dampaknya bisa dirasakan (Scholten 2008:292). Di Jambi, pada masa revolusi, sistem pemerintahan yang feodal sudah tidak berkuasa. Kesultanan Jambi telah dihancurkan Belanda dalam rangkaian Perang Jambi yang terjadi tahun 1900-1907. Setelah itu sistem pemerintahan Jambi diubah menjadi keresidenan di bawah pimpinan langsung Batavia.

Meski begitu, revolusi di Jambi diwarnai oleh semangat lokalitas yang membuatnya berbeda dari kebanyakan daerah lain yang mendukung penuh kemerdekaan Republik Indonesia. Di Jambi muncul narasi dan semangat untuk mengembalikan Kesultanan Jambi. Hal itu kemudian memunculkan permasalahan politik di Jambi pada masa revolusi. Menurut Purnomo (2000), permasalahan politik lokal di Jambi muncul saat pemerintah republik menunjuk pegawai administrasi dari luar daerah untuk mengisi pos-pos pemerintahan di Jambi. Puncaknya terjadi pada 1948, saat pembentukan Provinsi Sumatra Tengah pada yang berpusat di Padang dan Jambi masuk di dalam provinsi tersebut. Karena itu, banyak pegawai asli Jambi yang digeser dari posisinya. Hal ini senada dengan semangat revolusi sosial, bahwa pemerintahan lama yang feodal digantikan dengan pemerintahan baru

dengan sistem yang lebih demokratis dan kompeten.

Di Jambi terjadi penolakan terhadap orang-orang luar, khususnya dari para elite tradisional. Mereka menganggap bahwa orang-orang luar ini tak lebih dari penjajah dan disamakan dengan pemerintahan kolonial. Sebagian besar para pejabat luar ini berasal dari Padang, Jawa, dan daerah lainnya (Scholten 2008:333). Proses penolakan ini berlangsung secara politis, baik melalui perundingan dengan pemerintahan pusat Republik Indonesia maupun dengan pemerintahan Belanda yang sedang mencoba kembali menduduki Indonesia.

Sudah ada beberapa penelitian mengenai kondisi politik lokal di daerah-daerah Indonesia selama periode revolusi. Narasi kontrarevolusi di daerah-daerah lain juga memiliki karakternya sendiri. Seperti disebutkan (Reid 2012), kelompok elite tradisional di Sumatera Timur yang menentang kemerdekaan atau kontra revolusi dihabisi oleh kelompok pemuda revolusioner. Hal tersebut berkebalikan dengan yang terjadi di Jambi karena para elite tradisional justru diangkat menjadi kepala pemerintahan, contohnya Raden Inu Kertapati yang sebelumnya adalah pegawai pemerintahan Belanda. Seperti yang disebutkan Lucas (2019), gerakan kontrarevolusi sosial yang terjadi di Jawa berasal dari TNI yang bertugas untuk mengamankan situasi yang tidak terkontrol di daerah-daerah pergolakan karena tidak sesuai dengan konsep revolusi kemerdekaan menurut para elite Republikan di Jakarta. Namun, gerakan revolusioner di Jambi yang

berlomba untuk menumbangkan elite tradisional dengan cara kekerasan tidak terjadi. Hanya ada beberapa sabotase terhadap gerakan yang dilakukan oleh Dewan Djambi Sementara bekerja sama dengan Belanda. Selain itu, penelitian terbaru yang dilakukan Purwanto et al. (2023) mencoba menguraikan tindakan kekerasan yang dilakukan Belanda selama masa revolusi Indonesia dan sejarah kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada masa itu yang jarang diangkat oleh narasi sejarah nasional. Narasi baru itu menjadi pembuka jalan penelitian semacam ini karena revolusi di tingkat lokal selalu memiliki dinamikanya sendiri. Tak jarang narasi tersebut melawan paradigma penulisan sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia selama ini.

Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian mengenai kondisi Jambi abad ke-19 sampai 20, baik dalam segi sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam segi politik, terdapat penelitian dari Elsbeth Locher-Scholten yang membahas dinamika politik antara Kesultanan Jambi dan pemerintah kolonial di Batavia dan Belanda pada masa mekarnya imperialisme modern di dunia, abad ke-19 sampai 20. Secara singkat, Scholten menjelaskan kondisi Jambi pada masa revolusi di bagian epilog bukunya. Ia juga menyinggung Dewan Djambi Sementara yang dipandang sebagai upaya dari para elite tradisional untuk mengaktualisasikan diri dan daerahnya kembali dalam kontestasi politik yang sedang menggema di seluruh Indonesia Scholten (2008). Selanjutnya, terdapat tulisan Budi Purnomo yang membahas mengenai pembentukan Provinsi

Jambi. Dengan latar belakang kemerdekaan Indonesia, Jambi yang masuk ke dalam Provinsi Sumatra menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Saat terjadi pengembangan daerah pada 1948, Jambi dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatra Tengah yang berpusat di Padang, tanpa melihat aspek sejarah, sosiologi, ekonomi, dan politik masyarakat Jambi. Keputusan itu ditentang para elite politik di Jambi. Mereka menginginkan daerah Jambi berdiri dengan otonomi sendiri atau bergabung ke Sumatra Selatan karena dianggap lebih dekat secara budaya, ekonomi, dan politik (Purnomo 2000).

Dari berbagai studi di atas, tampaknya terjadi kekosongan narasi revolusi yang terkait dengan kondisi dan konflik politik masa revolusi kemerdekaan di Jambi, khususnya narasi pembentukan Jambi sebagai daerah istimewa dengan Dewan Djambi Sementara sebagai badan persiapan pendirian daerah istimewa itu. Narasi yang sudah ada selalu menekankan pada proses perjuangan suatu daerah dalam mendukung kemerdekaan Indonesia, padahal untuk memahami suatu peristiwa sejarah dengan jelas dibutuhkan penjelasan yang lengkap, khususnya di tingkat lokal.

Penelitian ini menjelaskan perjalanan Dewan Djambi Sementara dengan latar belakang konflik politik lokal yang terjadi di Jambi dalam kurun waktu 1945-1949. Penelitian mengenai kondisi revolusi kemerdekaan di tingkat lokal dapat membantu kita untuk memahami revolusi kemerdekaan dalam kacamata nasional sebagai sesuatu yang integral. Upaya pembentukan negara yang baru

merdeka mengalami hambatan-hambatan yang tidak sedikit. Namun, hal itu pula yang menumbuhkan nasionalisme di tingkat lokal, yang disebut sebagai revolusi sosial. Seperti yang telah dikemukakan Resink bahwa Indonesia tidak hanya dibentuk dari satu bendera tunggal melainkan banyak bendera, bukan sistem tarif tunggal melainkan banyak tarif berbeda, bukan kebangsaan tunggal melainkan banyak bentuk Resink (2012:336-337).

Penelitian ini menekankan pada beberapa hal, yakni: situasi konflik politik lokal di Jambi masa revolusi; bagaimana latar belakang munculnya keinginan untuk membentuk kembali Kesultanan Jambi; hubungan Jambi dengan Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda; serta dampak dari hadirnya Dewan Djambi Sementara bagi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia pada tingkat lokal dan di Jambi khususnya, serta menjadi pelengkap narasi dari sebuah masa yang selalu menjadi perdebatan.

B. METODE

Metode penelitian merupakan prosedur dan cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dalam suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan diteliti. Adapun metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Prosesnya adalah menggali sumber, memberi penilaian, mengartikan dan menafsirkan fakta yang ada pada masa lampau, yang kemudian dianalisis dan disimpulkan sebagai suatu peristiwa

(Gootschalk 2000:39). Tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo adalah: (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan sumber), (3) verifikasi (kritik sumber, keabsahan sumber), (4) interpretasi (analisis dan sintesis), serta (5) historiografi atau penulisan (Kuntowijoyo 2018:64).

Pemilihan topik mengenai revolusi kemerdekaan di Jambi didasarkan pada pertanyaan, bagaimana upaya pembentukan kembali Kesultanan Jambi yang dilakukan oleh Dewan Djambi Sementara? Berangkat dari pertanyaan itu, peneliti mulai mencari sumber (heuristik) yang relevan dengan peristiwa revolusi di Jambi dan menemukan beberapa dokumen penting yang bisa dibagikan dalam bentuk analisis penelitian. Sumber primer didapatkan dari inventaris Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan juga surat kabar sezaman. Sumber sekunder didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik revolusi kemerdekaan di Jambi.

Selanjutnya adalah tahapan verifikasi atau kritik sumber yang merupakan suatu kegiatan menilai sumber-sumber sejarah. Sumber yang ada diseleksi melalui kritik eksternal dan internal guna memperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Terdapat dua macam verifikasi yang dapat dilakukan, yakni menilai keaslian sumber dan menilai kredibilitas sumber apakah sudah sesuai dan bisa dipercaya. Hal tersebut dilakukan guna mencari suatu kebenaran yang objektif dan tidak terfokus pada satu sudut pandang saja.

Tahapan berikutnya adalah interpretasi, yaitu proses analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada, dengan tujuan untuk mendapatkan fakta. Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap berbagai sumber yang telah diverifikasi sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan menurut fakta-fakta yang telah terjadi dan ditemukan.

Langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sebagai tahap akhir dari seluruh prosedur penelitian sejarah. Di tahap ini, hasil penafsiran atau interpretasi ditulis sebagai sebuah karya sejarah. Karya tersebut mengedepankan aspek kronologis, yakni dengan mengurutkan suatu kejadian dalam kisah secara tematis sebagai suatu rekonstruksi yang imajinatif dari masa lalu berdasarkan data yang diperoleh (Gootschalk 2000:32).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Kondisi Politik Jambi Masa Revolusi

Proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 membawa respons bermacam-macam di tingkat lokal. Di Jambi, berita mengenai proklamasi baru sampai keesokan harinya, yaitu pada 18 Agustus 1945. Berita ini diterima oleh R. Sudarsono, pimpinan buruh tambang minyak di Jambi (Suwondo 1982:45). Berita itu kemudian diteruskan kepada masyarakat Jambi.

Perubahan mendadak yang terjadi pada masa awal kemerdekaan membawa angin segar bagi masyarakat Jambi. Saat itu, terjadi dekolonisasi

simbol-simbol kolonialisme menyambut berita kemerdekaan dan hal yang serupa hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia (Tanjung 2015:300). Berita kemerdekaan ini sekaligus memberi harapan kepada masyarakat Jambi yang sebelumnya hidup sengsara di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Pengibaran bendera Merah Putih di Jambi pertama kali dilakukan di atas menara air Kota Jambi pada 22 Agustus 1945. Meskipun ada larangan dari Pemerintah Jepang untuk mengibarkan bendera itu, tetapi tekad dan semangat rakyat menyambut kemerdekaan lebih besar. Pada akhirnya, Pemerintah Jepang hanya bisa pasrah sehingga pengibaran bendera Merah Putih terjadi di mana-mana (Suwondo 1982:46).

Selanjutnya, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI), maka pemerintah daerah membentuk KNI Jambi melalui rapat tertutup yang dipimpin oleh Dr. Sjagaf Jahja pada 29 September 1945. Kemudian, Dr. Sjagaf Jahja terpilih dan diangkat menjadi residen pada rapat tersebut. KNI Jambi menyelenggarakan rapat kembali pada 7 Oktober 1945. Abdullah Kartawirana terpilih sebagai Ketua KNI Jambi. Tugas dan fungsi KNI Jambi saat itu adalah sebagai badan pembantu residen. Tidak lama setelahnya, Dr. Sjagaf Jahja mengundurkan diri sebagai residen dan digantikan seorang bangsawan Jambi, yaitu Raden Inu Kertapati, pada November 1945.

Raden Inu Kertapati merupakan putra dari Sultan Thaha Saifudin, sultan terakhir Jambi yang menyerah

kepada Belanda pada 1904. Saat Perang Jambi berkecamuk, Raden Inu Kertapati masih anak-anak. Dengan latar belakang garis keturunannya itu ia disegani dan dianggap sebagai orang yang paling tepat untuk menjadi pemimpin Jambi selanjutnya. Saat dipilih menjadi residen, usianya sekitar 60 tahun. Sebelumnya, ia bekerja sebagai pengawas candu dan asisten demang di Jambi pada 1919-1942. Raden Inu Kertapati terkenal dengan kejujuran, kehandalan, dan kegigihannya membela kepentingan Jambi dalam Republik Indonesia. Ia juga menekankan semboyan “Jambi untuk Jambi” (Scholten 2008:332-33).

Kondisi nyata di Jambi berbeda dengan semangat yang diutarakan Raden Inu. Kursi pemerintahan banyak diisi pejabat yang berasal dari luar daerah, seperti Padang, Jawa, Palembang, dan wilayah lainnya. Hal ini memunculkan narasi romantisme sejarah mengenai pembentukan Daerah Istimewa Jambi atau pembentukan kembali Kesultanan Jambi yang sebelumnya telah runtuh dalam rangkaian Perang Jambi yang terjadi 1900-1907.

Reorganisasi KNI Jambi terjadi lagi pada 25 Oktober 1945 dengan Makalam yang dipilih sebagai ketua. Selanjutnya, pada 28 Maret 1946, KNI Jambi melakukan rapat lagi dan hasil dari rapat itu adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jambi yang beranggotakan 40 orang. Badan ini diketuai Raden Inu Kertapati (Depdikbud 1976:26-27).

Untuk memahami bentuk dari KNI, Reid (2018:34) menyebutkan bahwa KNI merupakan kelanjutan dari cabang

Hokokai pada masa Jepang dan kebanyakan anggotanya adalah elite nasionalis tua. Pada masa awal kemerdekaan, Pemerintah Pusat Republik Indonesia mengakui peran dan kemampuan para elite tradisional yang sebelumnya telah bekerja, baik pada masa Belanda maupun Jepang (Lucas 2019:99-100). Permasalahan yang muncul dari pengangkatan para elite tradisional ini adalah kesetiaan mereka yang diragukan. Mereka dianggap dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, yakni Republik Indonesia yang baru berdiri dan Pemerintah Belanda, yang keduanya hendak menegakkan kekuasaan (Kahin 1989:274).

Jika kita tarik kembali ke belakang, tepatnya pada 1916, di Jambi pernah terjadi sebuah pemberontakan yang diakibatkan oleh perubahan administrasi. Sebuah pola yang mirip ketika Belanda menghancurkan Kesultanan Jambi dan menggantinya dengan keresidenan. Belanda mengangkat banyak pegawai pemerintahan yang berasal dari daerah luar Jambi. Orang luar yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan di Jambi tersebut bertindak semena-mena dan tidak disukai oleh rakyat. Pemberontakan tahun 1916 itu diinisiasi dan dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki hubungan darah dengan elite Kesultanan Jambi. Meski begitu, pengaruh dari Kesultanan Jambi tetap kuat dan menjadi motivasi serta legitimasi bagi para pemimpin pemberontak. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan nama dan gelar para bangsawan Kesultanan Jambi yang telah wafat oleh para pemimpin

pemberontak. Alasannya adalah untuk melegitimasi kepemimpinan, seperti yang dilakukan pemimpin pemberontak bernama Duahid bin Dualip yang menggunakan gelar Sri Maharaja Batu, yakni raja pertama Jambi. Setidaknya, hal itu menjadi salah satu faktor politik penyebab terjadinya pemberontakan pada 1916, di samping faktor lain, misalnya kemunculan semangat agama Islam yang dibawa Sarekat Islam (Muttalib 1977:85-100)

Ancaman pergeseran posisi pada masa revolusi tidak hanya dirasakan oleh kalangan pejabat asli Jambi biasa, melainkan juga dirasakan oleh Raden Inu Kertapati. Pada September 1946, ia menjabat residen dibantu oleh R.M. Utoyo, seorang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Palembang. Tak lama setelah itu, Raden Inu Kertapati turun dari posisinya sebagai Ketua Dewan Militer Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat karena kalah dari Utoyo, namun ia tetap menjabat sebagai residen. Perubahan itu melemahkan kekuasaan dan kekuatan Raden Inu Kertapati. Hal itu juga meningkatkan pengaruh republik sekaligus meningkatkan perasaan antirepublik di Jambi (Scholten 2008:333). Perasaan regionalisme masih sangat besar. Walaupun ada orang-orang baru yang sudah memiliki kesadaran untuk bersatu dalam nasionalisme Indonesia, namun cinta yang besar kepada daerah dan golongannya menimbulkan kecurigaan berlebihan terhadap orang-orang dari daerah lain (Radjab 2014:371).

Semangat regionalisme Jambi yang kuat ini muncul di tengah-tengah pembentukan sebuah negara yang baru

berdiri dan rapuh, yaitu Republik Indonesia. Hal ini membawa politik Jambi kepada intrik yang membagi elite pemerintahan Jambi menjadi dua, yaitu elite tradisional yang mendukung pembentukan kembali Kesultanan Jambi dan elite revolusioner yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun secara politis sudah mulai terjadi pembelahan di dalam pemerintahan Jambi, namun para elite tradisional dan elite revolusioner tetap bersama-sama melindungi Jambi dari Belanda pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Salah satu target penyerangan dari Belanda adalah lapangan terbang Paal Merah yang berada di Kota Jambi yang dilakukan untuk memutus transportasi (Zamzami dan Indrayani 2021:17-26). Penangkapan dan penyerangan insidental mewarnai Jambi dalam agresi militer pertama ini. Tidak ada kontak senjata frontal antara rakyat dan militer Jambi melawan Belanda (Suwondo 1982:71-72).

Puncak kekecewaan elite tradisional Jambi terhadap pemerintah republik terjadi ketika pembentukan Provinsi Sumatra Tengah yang didasari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1948. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Jambi menjadi bagian dari Provinsi Sumatra Tengah bersama Padang dan Riau, dengan Padang sebagai pusatnya. Kondisi transportasi dan jalan yang buruk menyebabkan urusan administrasi dari daerah menuju pusat menjadi sulit. Selain itu, pembentukan Provinsi Sumatra Tengah dinilai tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat Jambi dan juga kondisi sosial, ekonomi, politik, serta

budaya masyarakat Jambi. Hal ini sama saja dengan melangkahi hak-hak demokrasi rakyat Jambi (Purnomo 2000:41).

Secara geografis, Jambi berada di antara dua kekuatan politik besar, yaitu Padang dan Palembang. Di kalangan para sejarawan terdapat dikotomi geografis di Jambi yang membedakan kultur dan politik masyarakatnya, yaitu “hulu” dan “hilir” (Andaya 2016:31). Pusat kekuatan politik Jambi berada di hilir, lebih dekat dengan dunia luar dan lebih mendapat keuntungan ekonomi. Meskipun antara hulu dan hilir memiliki perbedaan linguistik dan budaya karena terpisah secara geografis, tetapi keduanya memiliki ikatan sejarah yang kuat. Dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut menggambarkan “ambiguitas” (Andaya 2016:40). Kondisi ini kemudian menjadi dasar historis bahwa Jambi secara politik lebih dekat dengan Palembang dibandingkan Padang. Meskipun secara politik dan kultural dekat, namun Jambi dan Palembang tidak terlalu dekat untuk berada dalam suatu pemerintahan yang sama. Maka dari itu muncul rencana untuk mengembalikan kedaulatan Jambi dengan membentuk Jambi yang otonom.

2. Hubungan Jambi dengan Republik Indonesia dan Belanda

Revolusi yang terjadi di daerah tidak dapat dilepaskan dari apa yang terjadi di pusat. Meskipun tidak selalu beriringan, tetapi keduanya memiliki hubungan yang saling terikat. Hal itu tampak jelas di Jambi. Dengan segala dinamika politiknya, upaya yang dilakukan para elite Jambi yang

prokesultanan ataupun prorepublik selalu memancing respons, baik dari Pemerintah Republik Indonesia maupun Belanda. Ketegangan yang terjadi di Jambi ini menghasilkan tuntutan Raden Inu Kertapati kepada pemerintah pusat republik untuk mengganti sebelas orang pejabat non-Jambi dengan orang Jambi, yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah pusat. Setelah permintaan itu dikabulkan, Pemerintah Jambi mendakwa tujuh pejabat non-Jambi dengan dugaan korupsi, termasuk R.M. Utoyo. Antusiasme yang rendah terhadap republik berhasil membuat Mohammad Hatta berkunjung ke Jambi pada 1947, sebelum agresi militer pertama (Scholten 2008:333). Kunjungannya ke Jambi ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Jambi dan juga mengampanyekan kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Jambi juga berkorespondensi dengan Belanda. Menurut Scholten (2008), sejak pertengahan 1946 telah datang surat dari Jambi yang berisi permintaan dukungan untuk pemulihan Kesultanan Jambi yang merdeka. Belanda tidak merespons surat tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan regional dan diplomasi dengan Republik Indonesia, yang saat itu sangat tegang, terutama sebelum disepakatinya Perjanjian Linggarjati pada November 1946. Akhirnya, pada 1947, Jambi mulai diperhitungkan oleh Belanda karena tambang minyaknya yang dianggap penting. Namun rencana itu tidak didukung Pemerintah Pusat

Belanda di Den Haag. Agresi militer terhadap tambang minyak dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan pada ladang minyak itu sendiri. Karenanya, saat agresi militer pertama, di Jambi tidak terjadi kontak fisik yang frontal.

Tuntutan pemulihan kesultanan atau otonomi khusus ini disampaikan elite tradisional Jambi kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Bersamaan dengan peristiwa revolusi sosial yang berlomba-lomba menggulingkan pemerintahan feodal di berbagai daerah, tuntutan Jambi untuk memulihkan kesultanan menjadi sebuah permintaan yang mustahil dikabulkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Maka dari itu, Jambi juga berkorespondensi dengan Pemerintah Belanda yang sedang berusaha menduduki Indonesia kembali. Melihat adanya upaya disintegrasi di Jambi, Pemerintah Belanda akhirnya mencoba mendukung upaya-upaya antirepublik itu. Pada masa awal kemerdekaan, Jambi merupakan daerah yang masih tertinggal. Hal itu tampak dari kurangnya perhatian pusat terhadap Jambi yang dirasakan semua kelompok. Para elite tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa tekanan dan instruksi dari pusat. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa keadaan itu menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya gerakan yang menuntut Jambi lepas dan menjadi suatu daerah otonom.

Konsep Harry J. Benda tentang corak hubungan kekuasaan kolonial di Indonesia pada abad ke-20 dapat digunakan untuk melihat kecenderungan hubungan elite tradisional Jambi dengan Belanda pada masa revolusi. Benda mengungkapkan dua

corak hubungan, yaitu *direct-rule* dan *indirect-rule* (1966:596). Dengan agenda politik pemerintahan Belanda yang menginginkan pembentukan negara federal maka daerah-daerah federal yang dibentuk Belanda akan memiliki ketergantungan kepada Belanda.

Selain itu, kecenderungan hubungan antara elite tradisional Jambi dan Belanda juga dapat dilihat melalui konsep *patron-client*. Perubahan konsep *patron-client* di Indonesia sudah disampaikan Sutherland (1983:97) dengan melihat kemunculan kerangka-kerangka baru yang mulai membebaskan diri dari kekangan dan ketergantungan terhadap protektorat Belanda. Perubahan ini merupakan dampak dari politik etis Belanda pada awal abad ke-20.

Kelompok elite tradisional Jambi adalah pihak yang menginginkan pemulihan Kesultanan Jambi. Kelompok yang menempati posisi sebagai *client* ini tentunya membutuhkan kekuatan besar di atasnya yang dapat melindungi dan mendukungnya untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kekuatan besar adalah Belanda sebagai *patron*. Hubungan antara keduanya dilandasi oleh kepentingan masing-masing. Seperti telah dikatakan sebelumnya, Belanda memiliki kepentingan politik yang bersifat umum dan khusus. Kepentingan umumnya adalah menginginkan pembentukan negara federal Indonesia, sedangkan kepentingan khususnya adalah menguasai minyak di Jambi yang menjadi daya tarik ekonomi bagi Belanda. Munculnya berbagai

kelompok dan kepentingan baru menuntut adanya jasa-jasa baru, yakni suatu birokrasi teknokrat yang netral sebagai tangan dari eksekutif yang membentuk mata rantai utama antara penguasa dan yang dikuasai (Sutherland 1983:26). Di Jambi, pemerintahan dikuasai elite tradisional, tetapi mereka juga yang menginginkan otonomi khusus untuk Jambi. Karenanya, netralitas politik pemerintahan Jambi patut untuk dipertanyakan. Hubungan antara Belanda dan elite tradisional Jambi pada masa revolusi dapat dilihat kecenderungannya menuju ke arah hubungan *patron-client* jika dilihat dari pola korespondensinya dan jika pemulihan Kesultanan Jambi berhasil dilakukan.

Atas dasar Perjanjian Linggarjati yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda pada November 1946, elite tradisional Jambi merasa bahwa Jambi kembali menjadi suatu daerah merdeka. Mereka menginginkan pemulihan kesultanan dan Jambi menjadi daerah otonom. Elite tradisional Jambi yang memiliki tuntutan tersebut membutuhkan kekuatan besar yang mendukungnya, apakah dari Pemerintah Belanda ataupun Pemerintah Republik Indonesia. Meski kemudian tuntutan itu tidak berhasil sepenuhnya, namun upaya paling jauh menuju tujuan elite tradisional Jambi itu telah mendapat perhatian dan respons positif dari Belanda Belanda.

Pada akhirnya, dalam laporan-laporan Belanda disebutkan bahwa pemerintahan yang mandiri di Jambi belum dapat dilakukan. Terdapat beberapa alasan yang mendasarinya,

yaitu: pemulihan kesultanan di Jambi tidak selaras dengan konsep republik, kecilnya wilayah Jambi yang dikuasai militer Belanda, dan halangan yang muncul dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dengan Republik Indonesia. Dari situ bisa dilihat bahwa ada upaya *indirect-rule* Belanda terhadap Jambi, sama seperti daerah lain yang menjadi daerah otonom bagian dari negara federal bentukan Belanda. Kondisi ini menunjukkan pengaruh Belanda sangat kuat. Namun di sisi lain, kebuntuan komunikasi dan kuatnya pengaruh Republik Indonesia di Jambi membuat upaya-upaya yang dilakukan elite tradisional Jambi untuk mendapatkan otonomi daerahnya pada masa revolusi tidak dapat terwujud.

Meskipun setelah itu dukungan Belanda hanya diungkapkan secara verbal, tetapi upaya-upaya pemulihan kesultanan tidak lantas berhenti. Korespondensi antara elite tradisional Jambi dan Belanda terus berlangsung untuk membahas upaya-upaya pemulihan kesultanan. Salah satu isi Perjanjian Linggarjati yang berbunyi “daerah yang belum berkenan untuk menjadi bagian dari demokrasi Negara Indonesia Serikat dapat diberi hak untuk menjadi daerah istimewa” dijadikan dasar dari upaya tersebut (Leirissa 2006:56-64). Bahkan, untuk dapat menggapai tujuan itu, kelompok prokesultanan mendukung dan meminta diadakannya agresi militer ketiga di Jambi untuk melawan pengaruh Republik Indonesia (ANRI t.t).¹

¹ Surat Raden Jafar Kertapati kepada Asisten Residen Pemerintah Belanda, 10 September 1949.

Di pihak lain, hubungan Pemerintah Republik Indonesia dengan Jambi setelah agresi militer pertama tetap berjalan dan Jambi tidak bisa membendung pengaruh pemerintah republik yang semakin kuat di Jambi. Pemerintah Republik Indonesia juga memiliki strategi mengenai hubungannya dengan Jambi. Menyadari kecilnya atensi yang didapat, maka Raden Inu Kertapati diberi gelar militer setelah agresi militer pertama.

Pada 1948, kedatangan Soekarno dan Hatta disambut di Jambi. Secara umum, masyarakat Jambi konservatif dalam hal politik dan condong kepada partai Islam, misalnya Masyumi. Meskipun demikian, tidak menutup fakta bahwa partai lain, seperti PNI, PESINDO, dan PKI, juga terdapat di Jambi. Umumnya partai-partai ini didominasi oleh orang luar Jambi (Scholten 2008:336). Kesadaran politik masyarakat Jambi yang berbeda itu tidak bisa dilepaskan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jambi. Selain itu, faktor rendah diri yang ada pada rakyat dan pemerintahnya membuat Jambi seperti tertinggal dari daerah lain. Hal ini kemudian dapat dilihat sebagai kesadaran eksistensialisme masyarakat dan elite tradisional Jambi akan bentuk pemerintahan yang paling cocok bagi mereka.

Tuntutan pemulihan Kesultanan Jambi kemudian menjadi masuk akal dengan kepercayaan diri yang ada pada masyarakat Jambi yang cenderung konservatif. Faktor-faktor itu ditambah lagi dengan kurang tegasnya politik pemimpin Jambi yang membuat mereka selalu berada dalam tekanan dan

cenderung memilih pihak yang kuat. Dalam hal pemulihan kesultanan ini, Belanda yang memiliki agenda federalisme menyetujui pembentukan Dewan Djambi Sementara. Kunjungan elite Pemerintah Republik Indonesia dan hadirnya partai-partai tetap tidak memengaruhi upaya untuk mengembalikan Kesultanan Jambi. Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948 kemudian memberi momentum bagi kehadiran Belanda kembali di Jambi. Seiring dengan itu, dukungan terhadap pembentukan daerah istimewa Jambi menjadi semakin kuat.

3. Dewan Djambi Sementara dan Perubahan Tuntutan

Melihat hubungan politik dengan Pemerintah Republik Indonesia yang mustahil untuk memberikan otonomi khusus atau pemulihan kesultanan, maka elite tradisional Jambi bergantung kepada Belanda. Di satu sisi, Jambi secara *de facto* menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah, Republik Indonesia. Di lain sisi, Jambi melakukan korespondensi dengan Belanda untuk memulihkan kesultanan dan lepas dari Republik Indonesia ataupun Sumatera Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sikap politik Jambi pada masa revolusi tidak konsisten dan didominasi oleh dua kekuatan, yaitu elite tradisional lokal yang mendukung pembentukan kembali kesultanan dan elite revolusioner yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisi rakyat sendiri, tingkat kesadaran politik sangat memengaruhi dalam hal pemberian dukungan pada salah satu pihak di masa revolusi. Pada umumnya rakyat juga

terbagi ke dalam dua kelompok tersebut.

Tahun 1949 menjadi babak baru bagi kelompok prokesultanan. J. J. van de Velde sebagai penasihat pemerintah di Jambi dan J.B. van Schendel sebagai asisten residen memberikan rekomendasi mengenai gambaran politik di Jambi. Mereka menyatakan bahwa gerakan prokesultanan di Jambi adalah gerakan natural penduduk Jambi yang dipimpin pemimpin feodal lama yang kehilangan posisi karena kedatangan orang-orang Republikan (ANRI t.t).² Hubungan antara kelompok revolusioner dan kaum prokesultanan yang konservatif pada 1949 menjadi semakin tegang.

Perkembangan konflik politik Jambi pada 1949 ditandai dengan dibentuknya Dewan Djambi Sementara yang disetujui Belanda pada 31 Maret 1949, dengan Raden Inu Kertapati sebagai ketuanya (ANRI t.t).³ Pada saat itu, Belanda sedang gencar mendukung daerah yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia Serikat (RIS). Keinginan yang ingin diwujudkan dari pembentukan Dewan Djambi Sementara adalah membuat Jambi sebagai daerah istimewa dengan mengembalikan sistem kesultanan, seperti sebelum 1907. Meskipun konsep federal seperti ini disukai Belanda, namun Belanda kurang setuju atau menunda-nunda untuk memberi dukungan penuh. Alasannya adalah karena baru sepertiga wilayah Jambi yang dikuasai Belanda sehingga

pengaruh Belanda tidak signifikan (Scholten 2008:338).

Selain itu, meskipun pemerintahan kesultanan berdiri, Jambi tetap tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan pusat yang lebih demokratis, yaitu Republik Indonesia Serikat. Pertikaian di dalam Dewan Djambi Sementara juga terjadi, utamanya dari anggota yang pro terhadap Republik Indonesia.

Susunan Dewan Djambi Sementara terdiri atas 9 orang Indonesia yang dipilih rakyat, 2 orang Indonesia yang diangkat wakil Pemerintah Federal, 2 orang Cina yang dipilih penduduk Cina, dan 2 orang Belanda yang diangkat wakil Pemerintah Federal. Lima belas orang anggota Dewan Djambi Sementara tersebut akan mengalami penambahan sebanyak 27 anggota yang merupakan orang Indonesia yang dipilih rakyat sesuai dengan perluasan pemerintahan federal atas daerah Jambi sehingga seluruh anggota dewan menjadi 33 orang (ANRI t. t.).⁴

Tugas Dewan Djambi Sementara yang sebelumnya dipersiapkan sebagai badan persiapan pembentukan Daerah Istimewa Djambi atau Kesultanan Jambi diubah oleh Belanda menjadi penasihat Pemerintah Residen (ANRI t.t).⁵ Perubahan itu dilakukan karena Pemerintah Belanda memiliki keraguan terhadap Jambi terkait dengan banyaknya daerah Jambi yang belum dikuasai militer Belanda. Selain itu, pengambilan keputusan tentang Jambi sebagai daerah “istimewa” masih

² *Memorandum van de Velde kepada wakil tinggi Kerajaan Belanda, No. 6719/AGSU 7.*

³ *Staatsblad No. 93.*

⁴ *Schets omtrent bevoegdheid, samenstelling en taak van de Voorlopige Dewan Djambi.*

⁵ *Telegram Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken, ref No. 2899.*

menjadi persoalan karena bagaimanapun juga sistem kesultanan yang feodal tidak akan cocok dalam sebuah konsep negara federal yang demokratis. Rencana Belanda terhadap Jambi adalah memberi otonomi khusus setara negara dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Pengambilan keputusan itu harus dilakukan melalui pengambilan suara di masyarakat Jambi (ANRI t. t.).⁶

Keengganan Belanda memberikan otonomi khusus kepada Jambi juga dapat dilihat dari kacamata politik nasional saat itu. Pada Mei 1949, dilakukan Perjanjian Roem-Royen dan salah satu isinya adalah Belanda tidak akan mengakui negara atau daerah yang berdiri di atas daerah Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan daerah Republik Indonesia tersebut (Leirissa 2006:245-246). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Djambi Sementara sendiri diresmikan oleh Belanda pada 31 Maret 1949 sehingga usaha politik Belanda di Jambi juga akhirnya tertahan oleh kesepakatan Roem-Royen itu.

Dengan status yang tidak jelas mengenai tugas dan wewenang Dewan Djambi Sementara ini maka dualisme di Jambi tetap terjadi dan tidak dapat dihindari. Pembentukan Dewan Djambi Sementara juga menandai arah politik Jambi menuju federalisme. Maka dari itu, wakil dari Jambi diterima di *Bijeenkomst voor Federale Overleg*

(BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal, tidak sebagai anggota melainkan hanya sebagai peninjau karena status Jambi yang belum jelas. Adapun utusan Jambi yang menghadiri rapat BFO adalah A. Challik Djajoningrat, Raden Sjahaboedin, dan seorang Belanda bernama J.B. van Schendel (Anonim 1949).

Dewan Djambi Sementara mengadakan sidang pleno perdana pada Agustus 1949. Sidang tersebut menghasilkan konsensus yang sama seperti sebelumnya mengenai otonomi regional, tetapi tidak mengalami kemajuan apapun (Scholten 2008:339). Di sisi lain, pembentukan KNI yang telah dipercepat sejak awal dan berhubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia memberi kekuatan dan pengakuan kepada kelompok baru yang lebih mapan dan moderat. Pengaruh Republik Indonesia di Jambi pun tidak dapat dibendung.

Pada September 1949, sebuah perjanjian gencatan senjata lokal tercapai dan garis demarkasi ditetapkan. Pelaksanaannya berjalan lancar hingga terjadi peralihan kewenangan administratif sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949. Peralihan administratif ini sekaligus menguapkan harapan Dewan Djambi Sementara untuk memulihkan Kesultanan Jambi. Bahkan, dengan peralihan administrasi ini, Dewan Djambi Sementara dibubarkan. Pemerintah Republik Indonesia akhirnya secara penuh berkuasa di Jambi. Jambi pun tetap menjadi bagian dari Sumatera Tengah, yang sekaligus mengakhiri gerakan dan gagasan mengenai pemulihan Kesultanan Jambi

⁶ *Erkenning van een voorlopige vertegenwoordiging voor Djambi: Departement Van Binnenlandse Zaken.*

ataupun membentuk Jambi sebagai daerah yang otonom.

Sebuah laporan kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai sabotase terhadap kegiatan politik Dewan Djambi Sementara dilakukan para pemuda yang diinisiasi Chaidir Kimin, K.A. Hamid, A. Rahim, dan Darwis Parendangan. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pembentukan Dewan Djambi Sementara merupakan upaya Belanda untuk menguasai Jambi. Adapun upaya sabotase itu dilakukan dengan cara memasukkan para pemuda Republik Indonesia ke dalam Tentara Istimewa Djambi dan kepolisian. Selain itu, dilakukan pula penggiringan opini massa dengan meninjau pendapat umum tentang pengembalian daerah Jambi ke dalam Perjanjian Renville. Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatra (URIPS) juga menjadi soal dalam laporan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan kekacauan dengan tidak adanya aturan yang jelas, ditambah lagi dengan kekacauan politik yang terjadi di Jambi (ANRI 1995).⁷

Kegagalan Dewan Djambi Sementara dalam memperjuangkan regionalisme Jambi pada masa revolusi tidak kunjung berhenti. Setelah menyadari ketidakmungkinan untuk memulihkan kembali kesultanan dalam Republik Indonesia tuntutan pun berubah, yaitu otonomi daerah setingkat provinsi dengan berpisah dari Sumatera Tengah. Organisasi yang muncul setelah revolusi berakhir adalah Front Pemuda Jambi (Fropedja) dan Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) yang

melanjutkan semangat perjuangan regionalisme Jambi. Perjuangan panjang itu membuahkan hasil pada 1957. Jambi diresmikan menjadi Daerah Tingkat I atau provinsi (Purnomo dan Indrayani 2020:2-7). Periode ini menjadi suatu awal baru bagi rakyat Jambi. Semangat “Jambi untuk Jambi” akhirnya terwujud meskipun tidak dalam bentuk kesultanan sebagaimana yang diharapkan sebelumnya. Jambi mendapatkan martabatnya kembali dan meneruskan perkembangannya sebagai provinsi di Republik Indonesia.

D. SIMPULAN

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 membawa semangat kebebasan akan belenggu penjajahan yang selama itu telah dirasakan rakyat Indonesia, tak terkecuali di Jambi. Di Jambi, semangat itu digambarkan dengan pengibaran bendera Merah Putih di kantor-kantor pemerintahan. Kemerdekaan ini otomatis membawa Indonesia kepada perubahan administrasi secara besar-besaran, ditambah lagi dengan semangat revolusi sosial yang bergejolak di banyak daerah di Indonesia.

Di Jambi, semangat revolusi sosial kurang memiliki energinya dan perubahan administrasi itu menimbulkan gejolak. Banyak posisi pemerintahan di Jambi yang diisi orang dari luar Jambi, seperti Padang, Jawa, dan lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan Residen Raden Inu Kertapati yang memiliki semboyan “Jambi untuk Jambi”. Lobi-lobi politik dengan Pemerintah Republik Indonesia telah dilakukan untuk mengurangi pegawai

⁷ Laporan 7 Desember 1949 tentang sabotase politik Dewan Djambi Sementara.

dari luar Jambi namun tidak bisa membendung kekuatan Republik Indonesia yang kian kuat di Jambi.

Selain narasi kemerdekaan Indonesia, ada narasi lain yang berkembang di Jambi selama masa revolusi itu, yaitu pemulihan Kesultanan Jambi atau pembentukan Daerah Istimewa Jambi. Hal ini sangat berlawanan dengan semangat revolusi sosial yang berlomba-lomba menurunkan pemerintahan tradisional yang feodal. Kesadaran akan kuatnya pengaruh Republik Indonesia dengan konsep demokrasinya, membuat kelompok prokesultanan berkorespondensi dengan Belanda. Puncaknya adalah dengan dibentuknya Dewan Djambi Sementara yang disetujui Belanda pada Maret 1949 dan direncanakan sebagai badan persiapan pembentukan Daerah Istimewa Djambi. Dalam perjalanannya, Dewan Djambi Sementara ini kurang mendapat dukungan, baik dari Pemerintah Republik maupun Belanda. Belanda enggan memberi dukungan penuh karena posisi Jambi berada di wilayah Republik Indonesia, sementara hanya sepertiga daerah Jambi yang dikuasai militer Belanda.

Kehancuran Dewan Djambi Sementara ini terjadi bersamaan dengan pemindahan administrasi secara penuh dari Belanda kepada Republik Indonesia sebagai buntut dari hasil Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Mimpi untuk mengembalikan Kesultanan Jambi telah sirna, namun semangat regionalisme Jambi tetap tumbuh subur dengan dirumuskannya beberapa perubahan tuntutan. Karena menyadari ketidakmungkinan pemulihan kesultanan, maka rakyat Jambi yang

tergabung ke dalam organisasi massa, seperti Front Pemuda Djambi (Fropedja) dan Badan Kongres Rakyat Daerah (BKRD), menuntut pemberian otonomi daerah setingkat provinsi kepada Jambi.

DAFTAR SUMBER

- Andaya, Barbara Watson. 2016. *Hidup Bersaudara Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Anonim. 1949. "Djambi Wenst een Plaats in het Federaal Bestel." *Indische Courant*, Maret, 23.
- ANRI. 1995. *Inventaris Arsip Sekretariat Negara 1945-1949*, No. 868.
- ANRI. t.t. *Algemene Secretarie 1942-1950*, No. 1298.
- Benda, Harry J. 1966. "The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia." *The Journal of Asian Studies* 25(4):589-605.
- Depdikbud. 1976. *Monografi Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Goetschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hoek, Anne-Lot. 2023. "Mendirikan Negara, Mengobarkan Perang: Kekerasan Militer dan Pembentukan Negara Indonesia Timur pada Tahun 1946." Hlm. 197-220 dalam *Dunia Revolusi: Perspektif dan Dinamika Lokal pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia*,

- 1945-1949, disunting oleh B. Purwanto, R. Frakking, A. Wahid, G. van Klinken, M. Eickhoff, Yulianti, dan H. Ireen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kahin, Audrey R. 1989. *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kuntowijoyo. 2018. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogtakarta: Tiara Wacana
- Leirissa, R. Z. 2006. *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sejarah.
- Lucas, Anton. 2019. *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Muttalib, Jang Aisjah. 1977. "Jambi 1900-1916: From War to Rebellion." Disertasi, Columbia University, New York.
- Purnomo, Budi. 2000. "Pembentukan Propinsi Jambi 1946-1958." Tesis, Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, Depok.
- Purnomo, Budi, dan Nelly Indrayani. 2020. "Gerakan Pasca Proklamasi Kemerdekaan (Kasus Pembentukan Propinsi Jambi 1946-1958)." *Istoria: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 16(2):1-11.
- Purwanto, Bambang, Roel Frakking, Abdul Wahid, Gerry Klinken, Martijn Eickhoff, Yulianti, dan Ireen Hoogenboom. 2023. *Dunia Revolusi, Perspektif dan Dinamika Lokal pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia, 1945-1949*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Radjab, Muhammad. 2014. "Kerja Berat Revolusi." Hlm. 366-89 dalam *Sumatera Tempo Doeloe dari Marco Polo sampai Tan Malaka*, disunting oleh A. Reid. Depok: Komunitas Bambu.
- Reid, Anthony. 2012. *Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional*. Depok: Komunitas Bambu.
- _____. 2018. *Indonesia, Revolusi & Sejumlah Isu Penting*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Resink, G. J. 2022. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Depok: Komunitas Bambu.
- Scholten, Elsbeth Locher. 2008. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: KITLV; Banana.
- Sutherland, Heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Suwondo, Bambang. 1982. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tanjung, I. L. 2015. "The Indonesia-nization of the Symbols of Modernity in Plaju (Palembang)." Hlm. 300-22 dalam *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*, disunting oleh F. Colombijn dan J. Cote. Brill.

Zamzami, Wahyu, dan Nelly Indrayani.
2021. "Pelabuhan Udara Paal
Merah dalam Agresi Militer
Belanda di Jambi tahun 1947-
1950." *Jurnal Siginjai* 1(1):17-26.